

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Era globalisasi telah membawa perubahan signifikan terhadap dinamika hubungan internasional, di mana interaksi antarnegara tidak lagi terbatas pada kerja sama diplomatik, tetapi juga mencakup integrasi ekonomi, pertukaran teknologi, dan koordinasi kebijakan lintas batas. Globalisasi mempercepat arus perdagangan, investasi, informasi, serta mobilitas manusia, sehingga negara-negara semakin saling bergantung dalam menghadapi isu-isu transnasional seperti perubahan iklim, krisis energi, keamanan pangan, dan urbanisasi berkelanjutan (Held & McGrew, 2007). Perkembangan teknologi komunikasi dan transportasi turut memperkuat keterhubungan ini, menjadikan tantangan lokal sering kali memiliki implikasi regional bahkan global (Scholte, 2005).

Globalisasi kerap dipahami sebagai *driving force* yang mendorong terjadinya perubahan dalam pola interaksi global. Hampir seluruh aspek kehidupan manusia tidak terlepas dari pengaruh arus globalisasi tersebut. Dalam dinamika interaksi global yang terus berkembang, negara-negara dituntut untuk senantiasa merumuskan dan menyesuaikan strategi, baik pada level nasional, regional, maupun global, guna mewujudkan dan melindungi kepentingan nasionalnya. Berdasarkan kapasitas dan peran dalam tatanan global, suatu negara pada dasarnya memiliki dua pilihan posisi, yaitu berperan sebagai penggerak globalisasi atau sekadar menjadi aktor yang mengikuti arah dan dinamika globalisasi tersebut (Rachmawati & Mutmainah, 2014).

Asia Tenggara merupakan salah satu kawasan yang mengalami percepatan integrasi ekonomi dan sosial yang didorong oleh arus perdagangan bebas, investasi asing langsung (*foreign direct investment*), migrasi tenaga kerja, dan perkembangan teknologi informasi. Kawasan strategis yang terdiri dari 11 negara, yakni Indonesia, Malaysia, Singapura,

Thailand, Brunei Darussalam, Filipina, Vietnam, Laos, Kamboja, Myanmar, dan Timor-Leste secara geografis terletak di persimpangan jalur perdagangan internasional antara Samudra Hindia dan Samudra Pasifik, menjadikannya pusat lalu lintas maritim dunia dan salah satu kawasan paling dinamis secara ekonomi (Acharya, 2003). Dalam rangka meningkatkan kerja sama politik dan sosial antarnegara di kawasan Asia Tenggara, pada 8 Agustus 1967 lima tokoh penting yakni Wakil Perdana Menteri Malaysia serta para Menteri Luar Negeri dari Indonesia, Filipina, Singapura, dan Thailand berkumpul di gedung Departemen Luar Negeri di Bangkok, Thailand. Pertemuan tersebut menghasilkan penandatanganan sebuah dokumen yang menjadi dasar pembentukan *Association of Southeast Asian Nations* (ASEAN). Tokoh-tokoh yang terlibat dalam penandatanganan tersebut adalah Adam Malik dari Indonesia, Narciso R. Ramos dari Filipina, Tun Abdul Razak dari Malaysia, S. Rajaratnam dari Singapura, dan Thanat Khoman dari Thailand (ASEAN Sekretariat, 2025).

Keterlibatan Singapura dalam ASEAN merupakan bagian dari upaya membangun identitas nasional yang selaras dengan identitas kawasan Asia Tenggara. Seperti negara-negara lain di kawasan tersebut, Singapura menghadapi tantangan *nation-building* di tengah dinamika sistem internasional yang ditandai oleh fragmentasi kekuatan global berbasis perbedaan ideologi (Hariyadi, 2020). Dalam konteks ini, Singapura menjadi contoh negara yang mampu memanfaatkan kerja sama regional melalui ASEAN untuk memperkuat kapasitasnya dalam menghadapi persaingan global. Melalui keanggotaannya di ASEAN, Singapura tidak hanya berhasil mengamankan, tetapi juga memperluas akses pasar dalam kompetisi ekonomi internasional (Rachmawati & Mutmainah, 2014). Globalisasi juga turut mendorong percepatan urbanisasi di Asia Tenggara, menjadikan kawasan ini sebagai salah satu pusat pertumbuhan ekonomi dunia. Kota-kota di Asia Tenggara berkembang pesat sebagai motor pembangunan, namun sekaligus menjadi titik krusial munculnya berbagai persoalan lingkungan dan sosial.

Urbanisasi yang berlangsung dengan cepat telah membentuk pola pembangunan kawasan secara signifikan.

ASEAN merespons fenomena ini dengan meluncurkan kerangka kerja sama regional yakni, *ASEAN Sustainable Urbanisation Strategy (ASUS)* pada tahun 2018 sebagai bagian dari *Master Plan on ASEAN Connectivity (MPAC)* 2025. Strategi ini dirancang untuk memandu kota-kota anggota dalam mengelola urbanisasi secara berkelanjutan melalui enam area prioritas, mencakup infrastruktur, lingkungan, kesehatan, tata kelola, inovasi ekonomi, serta mobilitas dan transportasi publik (The ASEAN Secretariat, 2012). Perumusan ASUS ini tidak dapat dilepaskan dari peran Singapura sebagai pemimpin regional terutama ketika menjabat sebagai Ketua ASEAN pada tahun 2018 yang memainkan peran penting dalam mendorong adopsi strategi tersebut. Singapura tidak hanya memperkuat ruang kolaborasi antarkota, tetapi juga memberikan model praktik terbaik melalui pengalaman panjangnya dalam perencanaan terpadu, teknologi urban, dan manajemen infrastruktur. Hal ini tercermin dalam *Singapore Liveability Framework*, yang menekankan keseimbangan antara kualitas hidup, keberlanjutan lingkungan, dan daya saing ekonomi, didukung oleh dua prasyarat utama: *integrated master planning and development* serta *dynamic urban governance* (Centre for Liveable Cities, 2018).

Menurut ASEAN Secretariat (2021), sekitar setengah populasi ASEAN saat ini tinggal di wilayah perkotaan, dan jumlah ini diproyeksikan meningkat hingga 70 juta orang pada tahun 2025. Fenomena ini tidak hanya memicu pertumbuhan ekonomi perkotaan, tetapi juga menciptakan tantangan besar seperti ketimpangan pembangunan, tekanan terhadap infrastruktur, degradasi lingkungan, dan risiko sosial yang dapat menghambat kohesi kawasan (ASEAN Secretariat, 2022). Dalam dokumen resmi *ASEAN Sustainable Urbanisation Strategy (ASUS)* yang disusun oleh ASEAN Secretariat, terlihat bahwa proses pengembangan strategi ini bukan hanya melibatkan ASEAN secara kolektif tetapi juga dipimpin koordinatif oleh perwakilan diplomatik yang berasal dari Singapore.

Salah satu *joint statement* yang dicantumkan di dalamnya ditandatangani oleh Ambassador Tan Hung Seng, Permanent Representative of the Republic of Singapore to ASEAN dan *Chair of the Lead Implementing Body for Sustainable Infrastructure (LIB-SI)*, bersama dengan Chair ACCC. Ini menunjukkan posisi strategis Singapura memimpin dan memfasilitasi dialog kebijakan urban berkelanjutan antarnegara ASEAN, termasuk dalam pengembangan ASUS sebagai inisiatif regional (The ASEAN Secretariat, 2018). Hal ini sejalan dengan konsep *shepherd leadership* dimana pemimpin dituntut memiliki kepemimpinan yang terintegrasi secara utuh atau *whole-person leadership*. Ini merupakan cara berpikir yang mencakup kemampuan untuk berpikir dan merencanakan ke depan, kemampuan dan kemauan untuk melihat kehidupan dari perspektif para pengikutnya (McCormick & Davenport, 2003). Singapura juga menjadi salah satu contoh model kepemimpinan *shepherd leadership*, yaitu model kepemimpinan yang menempatkan pemimpin sebagai figur pengarah yang memimpin melalui keteladanan, sekaligus membimbing dan melayani kebutuhan para anggota (McCormick & Davenport, 2003).

ASUS tidak hanya berfungsi sebagai kebijakan pembangunan perkotaan, tetapi juga sebagai instrumen *regional governance* yang mendukung proses integrasi ASEAN di tengah arus globalisasi. Dalam kerangka tersebut, ASEAN berperan sebagai institusi utama yang membimbing dan mengoordinasikan kerja sama pembangunan perkotaan berkelanjutan melalui ASEAN Sustainable Urbanisation Strategy (ASUS) (The ASEAN Secretariat, 2012). Di dalam mekanisme regional ini, Singapura tampil sebagai salah satu aktor kunci yang menjalankan peran nasionalnya sejalan dengan konsepsi peran nasional (*national role conception*) yang dibentuk oleh identitas, kepentingan, dan kapabilitas negara tersebut (Holsti, 1970). Menurut Holsti (1970), peran nasional didefinisikan sebagai pola perilaku dan orientasi kebijakan luar negeri yang dipersepsikan oleh para pembuat kebijakan sebagai fungsi dan tanggung jawab negara dalam sistem internasional. Dengan demikian, keterlibatan Singapura dalam ASUS dapat

dipahami sebagai manifestasi dari peran nasional yang dikonstruksikan dan dijalankan melalui kerangka ASEAN, di mana Singapura memposisikan dirinya sebagai aktor yang berkontribusi aktif dalam penguatan tata kelola pembangunan perkotaan berkelanjutan di tingkat kawasan.

Pendekatan sistem perkotaan Singapura memberikan kontribusi konkret terhadap landasan konseptual ASUS. Peran ini tidak hanya muncul dari struktur internalnya (100 % urbanisasi dengan rencana jangka panjang) tetapi juga dari *self-image* sebagai negara berbasis pengetahuan yang mampu memberi kontribusi kepemimpinan dalam isu urbanisasi berkelanjutan di forum ASEAN. Singapura sejak lama memposisikan dirinya sebagai negara maju yang berpandangan strategis terhadap urbanisasi, inovasi, dan keberlanjutan; hal ini tercermin dari *Singapore Green Plan 2030*, yang merupakan kerangka kebijakan nasional jangka menengah untuk keberlanjutan yang terintegrasi dengan prioritas global seperti SDGs. Program ini menegaskan peran Singapura sebagai negara yang tidak hanya mengatur urbanisasi secara domestik tetapi juga *knowledge provider* bagi kawasan melalui berbagi praktik terbaik tata kota berkelanjutan, transportasi umum efisien, dan perencanaan ruang kota yang adaptif terhadap perubahan iklim (mis. transportasi berbasis transit dan ketahanan air) sebagaimana dibahas dalam literatur akademik terkini tentang urbanisasi dan strategi keberlanjutan Singapura (The ASEAN Secretariat, 2018).

Melalui perencanaan wilayah yang terintegrasi, Singapura mampu menyediakan hunian publik bagi sekitar 80% penduduknya melalui kota-kota HDB yang mandiri dan inklusif (HDB, 2020). Keselarasan antara prinsip-prinsip dalam Liveability Framework dengan gagasan dasar ASUS yang juga menuntut keseimbangan sosial, lingkungan, dan ekonomi menunjukkan bahwa pengalaman Singapura dalam membangun kota yang layak huni telah berperan penting dalam membentuk orientasi ASUS sebagai pedoman urbanisasi berkelanjutan bagi kawasan ASEAN (Centre for Liveable Cities, 2025). Melalui platform kolaborasi seperti *ASEAN Smart Cities Network*, negara-negara anggota dapat berbagi praktik terbaik, mengakses sumber

pendanaan internasional, serta memperkuat posisi tawar kawasan dalam tata kelola global (*global governance*).

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan sebelumnya, penelitian ini mengangkat judul "*Peran Singapura Sebagai Shepherd Leadership dalam Implementasi ASEAN Sustainable Urbanisation Strategy.*" Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana dan mengapa Singapura menjalankan peran nasionalnya dalam implementasi ASEAN Sustainable Urbanisation Strategy (ASUS) melalui mekanisme kerja sama ASEAN. Fokus penelitian diarahkan pada bagaimana kapasitas nasional Singapura serta posisinya dalam ASEAN membentuk peran Singapura sebagai aktor yang berkontribusi aktif dalam implementasi ASUS. Penelitian ini tidak hanya menelaah peran Singapura sebagai pelaksana kebijakan regional, tetapi juga sebagai negara yang mentransformasikan pengalaman dan kepentingan domestiknya ke dalam agenda kolektif ASEAN.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

Mengapa Singapura menjadi role model dalam implementasi *Asean Urbanisation Sustainable Strategy*?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan penelitian adalah sebagai berikut:

1. Menganalisis peran Singapura sebagai *Shepherd Leadership* terhadap implementasi *ASEAN Sustainable Urbanisation Strategy* .
2. Menganalisis bentuk dan praktik implementasi *ASEAN Sustainable Urbanisation Strategy* oleh Singapura.

1.4 Manfaat Penelitian

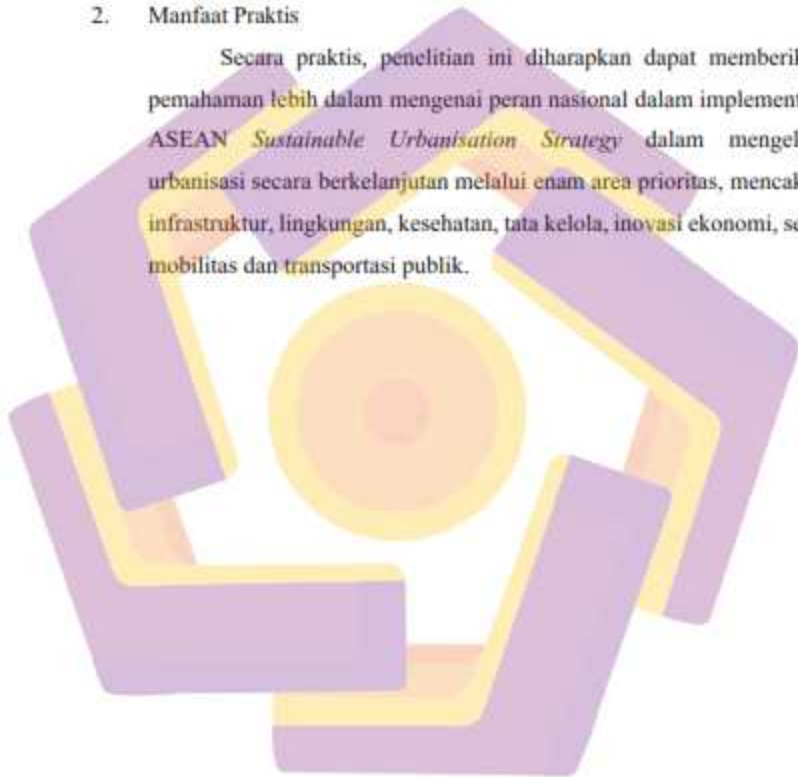
Penelitian diproyeksi akan memberikan dua jenis manfaat yaitu:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya kajian dalam ilmu hubungan internasional, khususnya subbidang peran nasional dalam hubungan internasional. Penelitian ini juga memberi kontribusi terhadap diskusi akademik mengenai implementasi ASEAN *Sustainable Urbanisation Strategy*.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman lebih dalam mengenai peran nasional dalam implementasi ASEAN *Sustainable Urbanisation Strategy* dalam mengelola urbanisasi secara berkelanjutan melalui enam area prioritas, mencakup infrastruktur, lingkungan, kesehatan, tata kelola, inovasi ekonomi, serta mobilitas dan transportasi publik.



1.5 Sistematika Penulisan

Dalam penelitian ini rancangan sistematika penulisan akan diuraikan ke dalam lima bab yang terdiri dari sub bahasan. Berikut ini adalah gambaran besar setiap babnya:

BAB I

Berisi tentang latar belakang penelitian, serta tujuan dan manfaat dari penelitian atau tulisan tersebut, serta sistematika penulisan.

BAB II

Berisi tentang tinjauan Pustaka yang membahas mengenai landasan konseptual atau teoritis, penelitian relevan terdahulu dan kerangka berpikir yang dapat mempermudah pembaca memahami inti dari penelitian.

BAB III

Berisi sub bab Teknik atau metode penelitian yang digunakan mulai dari jenis penelitian dan Teknik pengumpulan data dan teknik analisis data.

BAB IV

berisi hasil dan pembahasan penelitian terkait analisis peran Singapura dalam implementasi *ASEAN Sustainable Urbanisation Strategy* pada periode tahun 2018 hingga 2025.

BAB V

Bagian akhir dari skripsi yang berisi Kesimpulan dan Saran.